



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130/ 97) TAHUN 2020

TENTANG

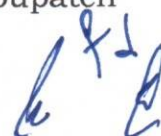
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAN INFORMASI  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bupati perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

h f d

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);



11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas:

a. Penasehat bertugas memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, analisis kinerja dan sistematika/format laporan;

b. Tim Pengarah bertugas :

1. memberikan arahan dan petunjuk operasional berupa pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh Penasehat;

2. mengkoordinasikan bahan laporan sesuai lingkup tugasnya;

3. melakukan analisis dan penilaian mandiri atas kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan (8 aspek) administrasi umum dan tataran pelaksana kebijakan capaian urusan wajib dan pilihan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. melaksanakan koreksi terhadap draft laporan yang telah disusun oleh Tim Teknis.

c. Tim Teknis bertugas :

1. melaksanakan kegiatan sinkronisasi sistematika/format yang telah digariskan oleh Penasehat dan Pengarah;

2. melaksanakan kompilasi dan pengolahan data serta penyusunan laporan;

3. melaksanakan perbaikan format, bahasa, dan sistematika penulisan sesuai dengan koreksi dan arahan dari Penasehat dan Pengarah.

d. Staf Administrasi bertugas:

1. memberikan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

2. memberikan saran, pendapat, dan dukungan operasional serta bentuk fasilitasi lainnya dalam rangka penyusunan, penyampaian dan proses pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 pada Kode Rekening 4.01.4.01.03.16.59.5.2.1.01.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 130/ 97 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 LAPORAN PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA  
 PEMERINTAHAN DAN INFORMASI  
 LAPORAN PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA  
 MASYARAKAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAN INFORMASI  
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., M.M.	Bupati Purbalingga	Penasehat
<b>TIM PENGARAH</b>			
1.	Wahyu Kontardi, S.H.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	R. Imam Wahyudi, S.H, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Drs. Agus Winarno, M.Si.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Yanuar Abidin, S.H.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Drs. Sridadi, S.H.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Anggota
6.	Ir. Zainal Abidin, M.Si.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kusmartadhi, S.H.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Drs. Widiyono, M.Si.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Siswanto, S.Pt, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Drs. Subeno, S.E., M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

1	2	3	4
<b>TIM TEKNIS</b>			
1.	Pandi, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Raditya Widayaka, A.P.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
3.	Naning Purwanti, S.STP.	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerja Sama Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
4.	Lita Dwi Anggraeni, S.Sos.	Kasubbag Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Dra. Puji Widiastuti	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Rahma Zetta Rahman, S.E., M.Si.	Kabid Anggaran dan Perimbangan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Imam Khasbullah, S.Sos, M.Ec.	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Bambang Kun Mardhani, S.E, M.Si.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kustinah, S.STP, M.Si.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Aris Budi Nugroho, S.STP.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Nur Azizah Erlita, S.IP, M.Si.	Kasubbag Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Bambang Sucipto, SKM.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4
13.	Tri Wahyu Dini Susanti, S.TP.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Lejar Hatiningar, S.Sos.	Kasi Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Ratnawati Dewi, SE. M.SE.	Kasi Pengembangan Destinasi dan SDM Pariwisata pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Wahyudi Pamungkas, S.STP.	Sekretaris Kecamatan Kertanegara	Anggota
17.	Parwati	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Ari Kurni Wahdani, S.E.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kasum, S.Sos.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	I Putu Agus Yamuna Sudiarta, S.STP.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Yudi Krismanto	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Subro Waluyo	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Adi Hendro Risdianto	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Ali Fakhrudin	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

**STAF ADMINISTRASI**

1.	Selvy Aprilia Chandra, S.STP., M.Si.	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
2.	Setya Adi Pratomo, S.E.	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Agus Purnomo, S.E.	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

1	2	3	4
4.	Fajar Apriliando Rustandi, S.STP.	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI